

PENERAPAN KESELAMATAN KERJA PADA TIM KERJA DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) SULAWESI SELATAN

Arni Juliani^{1*}, Kurnia Marsevtin Todingan², M. Anas³, Andi Tenriola Fitri Kessi⁴

Program Studi D3 Hiperkes dan Keselamatan Kerja, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar^{1,2,3,4}

*Corresponding Author : arnhi.juliani@gmail.com

ABSTRAK

Keselamatan kerja merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja sehingga harus mendapat perhatian khusus di tempat kerja untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat dan nyaman dalam bekerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Keselamatan Kerja pada Tim Kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode observasional deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu keadaan atau fenomena secara objektif dengan menggunakan angka-angka untuk menghitung frekuensi, rata-rata atau persentase, tanpa melakukan manipulasi pada suatu variabel. Sampel dalam penelitian merupakan bagian dari populasi berjumlah 46 orang dengan teknik pengambilan total sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan APD yang berjumlah 22 responden atau sekitar 47,8% berada pada kategori kurang, Prosedur kerja yang aman yang berjumlah 24 responden atau sekitar 52,2% berada pada kategori sangat baik, penyediaan alat dan infrastruktur yang berjumlah 28 responden atau sekitar 60,9% dengan kategori baik. Dukungan psikososial yang berjumlah 27 responden atau sekitar 58,7% berada pada kategori baik, Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan yang berjumlah 39 responden atau sekitar 84,8% berada pada kategori baik dan pengetahuan K3 yang berjumlah 45 responden atau sekitar 97,8% dengan kategori sangat kurang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan keselamatan kerja pada tim kerja di Badan Penanggulangan Bencana Alam (BPBD) Sulawesi Selatan sudah terlaksana dengan baik.

Kata kunci : bencana, BPBD, keselamatan kerja, kondisi darurat

ABSTRACT

Occupational safety is one of the efforts made to prevent workplace accidents so that it must receive special attention in the workplace to create a safe, healthy and comfortable environment in working. The purpose of this study is to determine the Implementation of Occupational Safety in the Work Team at the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in South Sulawesi. This type of research is quantitative research using descriptive observational methods that aim to describe or explain a situation or phenomenon objectively by using numbers to calculate the frequency, average or percentage, without manipulating a variable. The sample in the study is part of a population of 46 people with a total sampling technique. The results of this study indicate that the use of PPE totaling 22 respondents or around 47.8% is in the poor category, Safe work procedures totaling 24 respondents or around 52.2% are in the very good category, the provision of tools and infrastructure totaling 28 respondents or around 60.9% is in the good category. Psychosocial support, totaling 27 respondents (approximately 58.7%) was in the good category, Continuous evaluation and improvement, totaling 39 respondents (approximately 84.8%) was in the good category and K3 knowledge, totaling 45 respondents (approximately 97.8%) was in the very poor category. Therefore, it can be concluded that the implementation of occupational safety in the work team at the South Sulawesi Natural Disaster Management Agency (BPBD) has been implemented well.

Keywords : BPBD, disaster, occupational safety, emergency conditions

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan di Asia Tenggara yang sering mengalami bencana alam. Hal ini dikarenakan Indonesia berada di garis khatulistiwa dan berada dalam wilayah

cincin api. Cincin api merupakan titik pertemuan antara lempeng benua yang sangat aktif yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indonesia-Australia dan Lempeng Pasifik yang menyebabkan Indonesia mempunyai banyak patahan dan gunung berapi sehingga Indonesia masuk kedalam negara yang berpotensi terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung, banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran dan lainnya (Suprayitno dkk, 2022: 342). Dalam hal ini pemerintah mempunyai peran penting dalam penanggulangan bencana alam yang terjadi di Indonesia. Sebagai komitmen untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dalam negara, pemerintah harus mengusahakan agar masyarakat mendapatkan rasa aman yang menyatakan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh warga negara, bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia “UUD 1945 alinea keempat” (Suryadi, 2020).

Kesadaran akan tanggung jawab tersebut mendorong pemerintah untuk mengatasi permasalahan bencana alam dengan menuangkan kedalam UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan Nasional Penanggulangan Bencana merupakan lembaga pemerintah yang membantu pemerintah dalam menanggulangi bencana alam yang berskala nasional sedangkan BPBD merupakan lembaga pemerintah penanggulangan bencana yang lebih kecil seperti yang berada di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Namun, kedua lembaga pemerintah tersebut yaitu BNPB dan BPBD saling melengkapi dan bekerja sama dalam upaya penanganan bencana di Indonesia (Beong et al., 2018). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga pemerintah daerah yang bertugas untuk menangani dan mengurangi risiko bencana di wilayah tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi barisan terdepan dalam upaya penanggulangan bencana yang terjadi di Indonesia. Tugas tugas BPBD berisiko tinggi yang dimulai dari mengevakuasi korban, menyelamatkan nyawa dan menyelamatkan harta benda yang dilakukan dalam kondisi yang sulit dan berbahaya. Oleh karena itu, keselamatan kerja menjadi aspek krusial yang tidak boleh diabaikan dalam proses penanggulangan bencana (Pranoto, H. 2024: 2110).

Berdasarkan data bencana alam di Sulawesi Selatan diketahui bahwa pada tahun 2024-2025 telah terjadi beberapa bencana alam antara lain banjir sebanyak 150 kali di sejumlah titik di Sulawesi Selatan, tanah longsor sebanyak 169 kali, puting beliung sebanyak 35 kali, gempa bumi sebanyak 107 kali dan kebakaran sebanyak 292 kali. Selain itu, kebakaran hutan yang tercatat pada tahun 2024 telah terjadi sebanyak 6 kali di berbagai wilayah di Sulawesi Selatan (Badan Pusat Statistik, 2025: 128). Kegagalan dalam menerapkan standar keselamatan kerja dapat berakibat fatal baik bagi tim BPBD sendiri maupun bagi masyarakat sekitar. Kondisi lingkungan kerja yang ekstrim seperti medan yang sulit, cuaca buruk, dan paparan bahan berbahaya dapat meningkatkan potensi terjadinya insiden. Selain itu, tekanan psikologis akibat menghadapi situasi traumatis dan beban kerja yang tinggi juga dapat berdampak negatif pada kesehatan mental tim BPBD (Beong et al., 2018).

Penerapan keselamatan kerja yang efektif di BPBD memiliki dampak yang signifikan yang tidak hanya memberikan perlindungan kepada tim tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Tim yang sehat dan aman akan mampu melakukan pekerjaannya secara optimal, memberikan respons yang cepat dan tepat dalam menghadapi bencana sehingga hal ini akan berdampak positif pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tanggung jawab BPBD (BPBD, 2025) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan merupakan perangkat daerah Kota Makassar yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk menanggulangi bencana dari berbagai akibat yang ditimbulkan. Fungsi BPBD yaitu sebagai pedoman atau arahan jika terjadi bencana daerah, merumuskan peta daerah rawan bencana di wilayah kerjanya, menentukan standar keselamatan dan penanggulangan bencana, pengendalian pengumpulan sumbangan dan bantuan lainnya jika

terjadi bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan (2025) mempunyai tugas dan fungsi untuk menanggulangi bencana dari berbagai akibat yang ditimbulkan, yaitu merumuskan prosedur tetap penanggulangan bencana, hingga pelaporan dan evaluasi penanganan bencana. Fungsi nya yaitu sebagai pedoman atau arahan jika terjadi bencana daerah, merumuskan peta daerah rawan bencana di wilayah kerjanya, menentukan standar keselamatan dan penanggulangan bencana, pengendalian pengumpulan sumbangan dan bantuan lainnya jika terjadi suatu bencana.

Semua aspek di BPBD sangat lah penting untuk diperhatikan. Sistem ini harus mencakup aspek- aspek seperti pelatihan keselamatan kerja, penyediaan alat pelindung diri (APD) yang memadai, pengembangan prosedur kerja yang aman, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, dapat meningkatkan keselamatan kerja dan mengurangi risiko kecelakaan kerja sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya secara optimal dan berkontribusi pada penanggulangan bencana secara efektif. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan pada saat tim kerja BPBD mengevakuasi warga yang terdampak banjir di daerah BTP pada bulan 12 tahun 2024 terdapat salah satu dari tim kerja BPBD tersetrum arus listrik dan terjatuh. Selain itu, berdasarkan data primer yang saya dapatkan melalui wawancara langsung terhadap salah satu tim kerja di BPBD Sulawesi Selatan menyatakan bahwa minimnya pemahaman terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Kejadian yang dialami oleh salah satu tim BPBD yang terjatuh mengakibatkan tim tersebut mengalami luka gores dan kaki terkilir. Hal ini merupakan salah satu aspek keselamatan dalam penanggulangan bencana. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah harus memperhatikan keselamatan tim kerja BPBD sehingga mereka dapat bekerja dengan aman dan selamat.

Saat ini bencana alam sering terjadi secara tiba-tiba di wilayah Sulawesi Selatan sehingga tim kerja BPBD harus siap siaga untuk berpartisipasi dalam menangani bencana alam. Keselamatan merupakan hal yang harus di prioritaskan sehingga tidak terjadi suatu kecelakaan kerja ditempat kejadian. Untuk itu, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan penerapan keselamatan kerja pada tim kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Sulawesi Selatan tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Keselamatan Kerja pada Tim Kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Sulawesi Selatan tahun 2025, yang ditinjau dari berbagai aspek, meliputi penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), penerapan prosedur kerja yang aman, penyediaan alat dan infrastruktur pendukung keselamatan, pengelolaan faktor psikososial di lingkungan kerja, pelaksanaan evaluasi serta perbaikan berkelanjutan, serta tingkat pengetahuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada pekerja.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain observasional deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan penerapan keselamatan kerja pada tim kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Provinsi Sulawesi Selatan yang berjumlah 46 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling, sehingga seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Penelitian dilaksanakan di Kantor BPBD Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Kota Makassar, pada bulan Juni Tahun 2025. Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner terstruktur, lembar observasi, serta wawancara singkat untuk mendukung data primer, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan arsip BPBD. Analisis data dilakukan secara univariat untuk menggambarkan distribusi frekuensi dan persentase masing-masing variabel penelitian, meliputi penggunaan APD, prosedur kerja yang aman, penyediaan alat dan infrastruktur, dukungan psikososial, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, serta pengetahuan K3. Penelitian ini telah

memperhatikan aspek etika penelitian dengan menjunjung prinsip kerahasiaan data responden, persetujuan responden (informed consent), serta penggunaan data semata-mata untuk kepentingan ilmiah.

HASIL

Tabel 1. Distribusi Jenis Kelamin pada Tim Kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan

Jenis Kelamin	N	%
Laki-laki	29	63
Perempuan	17	37
Total	46	100

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan bahwa dari 46 responden tim kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah mayoritas berjenis kelamin laki-laki sebanyak 29 orang atau 63% sedangkan perempuan sebanyak 17 orang atau 37%.

Tabel 2. Distribusi Umur pada Tim Kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan

Umur	N	%
Dewasa Awal (26-35 tahun)	22	47,8
Dewasa Akhir (36-45 tahun)	15	32,6
Lansia Awal (46-55 tahun)	7	15,2
Lansia Akhir (56-65 tahun)	2	4,3
Total	46	100

Berdasarkan tabel 2, menunjukkan bahwa dari 46 responden tim kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan mayoritas umur responden adalah sebanyak 22 responden atau 47,8% dengan kategori dewasa awal antara umur 26-35 tahun , sebanyak 15 responden atau 32,6% dengan kategori dewasa akhir antara 36-45%, sebanyak 7 responden atau 15,2% dengan kategori lansia awal antara umur 46-55 tahun dan sebanyak 2 responden atau 4,3% dengan kategori lansia akhir antara umur 56-65 tahun.

Tabel 3. Distribusi Masa Kerja pada Tim Kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan

Masa Kerja	N	%
<6 tahun (Baru)	15	32,6
6-10 tahun (Sedang)	15	32,6
>10 tahun (Lama)	16	34,8
Total	46	100

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa jumlah responden tim kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan pada masa kerja yang paling dominan yaitu yang bekerja >10 tahun sebanyak 16 responden atau sekitar 34,8%.

Berdasarkan tabel 4, dapat dilihat bahwa tim kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan dalam upaya penerapan keselamatan kerja berdasarkan penggunaan APD dengan kategori kurang yang berjumlah 22 responden atau sekitar 47,8%.

Tabel 4. Distribusi Penggunaan APD pada Tim Kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan

Penggunaan APD	N	%
Sangat baik	1	2,2
Baik	19	41,3
Kurang	22	47,8
Sangat kurang	4	8,7
Total	46	100

Tabel 5. Distribusi Prosedur Kerja yang Aman pada Tim Kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan

Prosedu Kerja yang Aman	N	%
Sangat baik	24	52,2
Baik	16	34,8
Kurang	6	13
Total	46	100

Berdasarkan tabel 5, diperoleh bahwa penerapan keselamatan kerja berdasarkan prosedur kerja yang aman pada tim kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) paling dominan berada pada kategori sangat baik dengan jumlah persentase 52,2% atau sebanyak 24 responden.

Tabel 6. Distribusi Penyediaan Alat dan Infrastruktur pada Tim Kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan

Penyediaan Alat dan Infrastruktur	N	%
Sangat baik	16	4,3
Baik	28	60,9
Kurang	2	4,3
Total	46	100

Berdasarkan tabel 6, dapat diketahui bahwa penerapan keselamatan kerja berdasarkan penyediaan alat dan infrastruktur pada tim kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan terdapat pada kategori baik dengan jumlah 28 responden (60,9%).

Tabel 7. Distribusi Dukungan Psikososial pada Tim Kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan

Dukungan Psikososial	N	%
Sangat baik	1	2,2
Baik	27	58,7
Kurang	16	34,8
Sangat Kurang	2	4,3
Total	46	100

Berdasarkan tabel 7, menunjukkan bahwa dukungan psikososial yang diperoleh oleh tim kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berada pada kategori baik dengan jumlah 27 responden atau sebanyak 58,7%.

Tabel 8. Distribusi Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan pada Tim Kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan

Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan	N	%
Sangat baik	3	6,5
Baik	39	84,8
Kurang	3	6,5
Sangat kurang	1	2,2
Total	46	100

Berdasarkan tabel 8, dapat diketahui bahwa penerapan keselamatan kerja berdasarkan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan pada tim kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan sebanyak 39 orang atau dengan persentase 84,8% berada pada kategori baik.

Tabel 9. Distribusi Pengetahuan K3 pada Tim Kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan

Pengetahuan K3	N	%
Kurang	1	2,2
Sangat Kurang	45	97,8
Total	46	100

Berdasarkan tabel 9, dapat disimpulkan bahwa penerapan Keselamatan kerja berdasarkan pengetahuan K3 berada dikategori sangat kurang dengan jumlah responden sebanyak 45 orang atau sekitar 97,8%.

PEMBAHASAN

Penggunaan APD

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa penerapan keselamatan kerja berdasarkan penggunaan APD pada tim kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan masih dalam kategori kurang. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui kuesioner penelitian, sebagian besar tim kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan masih menyepelekan tentang pentingnya penggunaan Alat Pelindung Diri saat terjun di lokasi bencana. Penggunaan APD merupakan salah satu aspek keselamatan yang penting untuk dilaksanakan karena dapat membantu melindungi pekerja dari bahaya dan kecelakaan kerja dan mencegah penyebaran penyakit akibat kerja.

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa penyediaan Alat Pelindung Diri yang di sediakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan masih belum lengkap. Namun Alat Pelindung Diri yang disediakan semuanya dalam kondisi yang baik dan siap digunakan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan menyimpan Alat Pelindung Diri di ruangan tersendiri sehingga ketika diperlukan dapat dengan mudah untuk diambil. Sedangkan, hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa beberapa Alat Pelindung Diri yang disediakan tidak sesuai dengan jumlah tim yang biasanya turun dilapangan seperti baju wearpack dan masker gas double filter yang hanya tersedia tiga buah. Selain itu, beberapa tim yang turun kelapangan tidak menggunakan Alat Pelindung Diri yang lengkap seperti sarung

tangan dan helm. Tim kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri seperti helm dan sarung tangan saat turun menangani bencana di daerah dapat membahayakan diri sendiri seperti terjadinya infeksi dan terkena benda atau puing-puing tajam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan harus selalu memprioritaskan keselamatan kerja dengan menyediakan serta memastikan petugasnya menggunakan Alat Pelindung Diri yang lengkap dan sesuai dengan jenis bencana.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dhevani Wahyudi (2023) tentang upaya pencegahan kecelakaan kerja pada pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan bencana alam di kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa kecelakaan kerja di lapangan dikarenakan beberapa faktor yaitu salah satunya kurangnya kesadaran terhadap pentingnya menggunakan APD yang lengkap dan sesuai dengan jenis bencana. Meskipun demikian penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan beberapa studi lain yang melaporkan tingkat kepatuhan penggunaan APD yang lebih rendah. Misalnya, penelitian Gautam et al (2021) menemukan bahwa hanya 55% pekerja yang menggunakan APD secara lengkap, menunjukkan perlunya perhatian lebih untuk meningkatkan kepatuhan.

Prosedur Kerja yang Aman

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa tim kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan telah melaksanakan prosedur kerja yang aman. Hal ini menunjukkan bahwa tim kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan telah memastikan prosedur kerja yang aman telah terlaksana dengan sangat baik sehingga dapat meminimalisir risiko kecelakaan kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan produktif. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa prosedur kerja yang aman telah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini didasari oleh hasil wawancara yang dilakukan kepada tim kerja yang menyatakan bahwa prosedur kerja yang aman telah dilaksanakan sebelum turun kelapangan dan setibanya dilapangan melalui arahan-arahan yang akan diberikan oleh ketua tim. Prosedur kerja yang dilaksanakan oleh tim kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan berupa evakuasi yang aman dan terstruktur untuk memastikan keselamatan tim dan masyarakat yang terdampak.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan mendukung terlaksananya SOP prosedur kerja yang aman melalui pengawasan yang dilakukan dilapangan untuk memastikan tim mematuhi SOP yang sudah ditetapkan. Hal ini dapat menjadi upaya yang dilakukan oleh tim untuk terhindar dari berbagai bahaya yang dapat ditimbulkan dari pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, dengan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan SOP oleh tim dapat menjadi komitmen keselamatan kerja dalam hal melaksanakan prosedur kerja yang aman di lapangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dhevani Wahyudi (2023) tentang upaya pencegahan kecelakaan kerja pada pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan bencana alam di kota Semarang provinsi Jawa Tengah yang menyatakan bahwa pentingnya melaksanakan prosedur kerja yang aman di tempat kerja dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Dengan demikian penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh MDPI Safety (2020) tentang eksperimen terkendali yang menyelidiki dampak manual terhadap kepatuhan prosedur operasional yang menyatakan bahwa operator sering melewati SOP karena merasa terlalu kaku dan kurang adaptif terhadap situasi nyata, banyak operator memilih menggunakan pengalaman pribadi dibanding mengikuti SOP yang ada.

Penyediaan Alat dan Infrastruktur

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyediaan alat dan infrastruktur yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan yang memiliki ketersediaan peralatan yang lengkap dan dalam kondisi yang baik. Penyediaan alat dan infrastruktur merupakan salah satu aspek pendukung dalam menentukan keberhasilan suatu proses pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan mengenai penyediaan alat dan infrastruktur telah terlaksana dengan baik seperti alat-alat dan infrastruktur yang disediakan disesuaikan dengan kebutuhan bencana yg ditangani. Selain itu, peralatan dan infrastruktur yang digunakan akan dilakukan maintenance sebelum dan sesudah digunakan dilapangan untuk memastikan semuanya aman digunakan. Setiap terjadinya bencana di daerah akan ada tim kaji cepat yang ditunjuk khusus turun dilapangan untuk melihat langsung kerusakan dan kebutuhan apa yang diperlukan selama proses berjalan sehingga dapat berjalan efektif dan efisien.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoirun Nisa dan Hendra Try Ardianto (2025) tentang strategi mitigasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam upaya menangani banjir di Kabupaten Pati yang menyatakan bahwa Penguatan infrastruktur dan fasilitas penanggulangan bencana banjir adalah langkah penting yang harus diambil dalam meminimalisir dampak bencana dan meningkatkan ketahanan suatu daerah terhadap banjir serta dapat memperlancar proses penanggulangan bencana. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adjie Pamungkas et al (2021) tentang konsep penyediaan infrastruktur penampungan darurat di wilayah potensi terdampak gempa. Membuat konsep penyediaan infrastruktur, yang akan menghasilkan kelayakan penampungan, pemetaan dan penyiapan kebutuhan dasar.

Dukungan Psikososial

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan telah mendukung terlaksananya dukungan psikososial bagi tim kerja BPBD dengan baik. Hal ini berdasarkan dengan evaluasi hasil kuesioner yang menyatakan bahwa tim kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan telah mendapatkan dukungan psikososial untuk memulihkan kondisi psikososial tim pasca menangani bencana. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap tim kerja BPBD Sulawesi Selatan menyatakan bahwa dukungan psikososial yang diperoleh oleh tim masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan setelah tim yang dikirim keluar daerah akan mendapatkan support langsung dari kantor untuk istirahat sehari tapi jika ada kejadian darurat maka tim akan dipanggil untuk masuk bekerja kembali. Tim yang menangani bencana disuatu daerah harus mendapat dukungan psikososial dengan memberikan waktu istirahat 1-2 hari untuk memulihkan kondisi fisik dan mental.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ica Lisnawati (2022) yang menyatakan bahwa kesehatan mental adalah kondisi psikologis individu untuk menyadari kemampuannya, mampu menghadapi stres dan menyelesaikan dengan cara positif, mampu bekerja produktif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi terhadap komunitas di mana dia bernaung. Kesehatan mental adalah pondasi bagi individu untuk berfungsi optimal sebagai seorang manusia dan menjalankan perannya di keluarga, lingkungan kerja, dan komunitas. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saba, Z. I. Z. (2024) tentang pentingnya kesehatan mental karyawan di tempat kerja terhadap kinerja karyawan, yang menyatakan bahwa kesehatan mental melibatkan kesadaran akan potensi individu, kemampuan mengatasi stres, produktivitas, dan kontribusi positif kepada komunitas. Faktor-faktor seperti peristiwa kehidupan yang menekan, latar belakang keluarga, dan gangguan kesehatan fisik

dapat memengaruhi kesehatan mental seseorang. Kinerja karyawan tidak hanya tentang hasil kerja kuantitatif, tetapi juga perilaku kerja, seperti keterampilan interpersonal, inisiatif, dan tanggung jawab.

Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa penerapan keselamatan berdasarkan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan oleh tim kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan telah terlaksana dengan baik. Hal ini diperkuat dengan hasil kuesioner penelitian yang menyatakan bahwa tim kerja BPBD Sulawesi Selatan telah terlibat secara aktif dalam program evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dengan rutin mengikuti rapat evaluasi sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap tim kerja BPBD Sulawesi Selatan menyatakan bahwa evaluasi dan perbaikan berkelanjutan telah terlaksana dengan baik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan terdapat ada tiga tahap evaluasi yaitu evaluasi rutin yang dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan, evaluasi pasca bencana yang dilakukan setelah terjadinya suatu bencana ditempat tertentu dan evaluasi sistem yang dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Perbaikan berkelanjutan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan terdiri dari pengembangan rencana, peningkatan kapasitas penguatan koordinasi, pengawasan dan pemantuan. Tujuan dilakukan perbaikan berkelanjutan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dalam upaya penanggulangan bencana. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mareta, Diana, et al (2025) tentang analisis bentuk digital di bidang kedaruratan dan logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang yang menyatakan bahwa petugas BPBD dapat meningkatkan pengelolaan sistem informasi yang baik juga memungkinkan BPBD untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam strategi penanggulangan bencana.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadoan, S., Firman, F., & Sahrul, S. (2023). Strategi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Menghadapi Tantangan Perubahan Organisasi: (Studi di Kantor BPBD Kabupaten Bima), yang menyatakan bahwa Evaluasi berkelanjutan, pengembangan karir, pemanfaatan sumber daya manusia lokal, dan inovasi teknologi menjadi elemen pendukung dalam strategi pelatihan yang komprehensif. Rekomendasi termasuk pengembangan rencana pelatihan jangka panjang, peningkatan kerja sama antarlembaga, dan investasi dalam teknologi yang mendukung manajemen bencana dan pelatihan.

Pengetahuan K3

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pengetahuan K3 tim kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan berada pada kategori sangat kurang. Hal ini sesuai dengan hasil evaluasi kuesioner penelitian yang menyatakan bahwa sebagian besar tim kerja BPBD Sulawesi Selatan belum memahami tentang pengetahuan K3 ditempat kerja. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada tim kerja BPBD dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan K3 oleh tim BPBD Sulawesi Selatan masih sangat kurang. Hal ini didasari dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa BPBD Sulawesi Selatan belum menjalin ikatan kerja sama dengan instansi atau lembaga K3 dikarenakan kondisi finansial yang masih minim. Selain itu, BPBD Sulawesi Selatan belum memberikan pelatihan secara khusus kepada tim kerja yang dilakukan oleh Ahli K3 namun hanya sebatas penyampaian dasar mengenai K3 yang dilakukan oleh pengawas lapangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ro'i Chatul Uyun dan Evi Widowati (2022) tentang hubungan antara pengetahuan pekerja tentang K3 dan pengawasan K3 dengan perilaku tidak aman (*Unsafe Condition*) yang menyatakan bahwa kurangnya

pengetahuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja dapat menjadikan pekerja sulit untuk mengenali potensi bahaya yang ada di sekitar lingkungan kerja sehingga pekerja sulit menentukan tindakan yang akan diambil dalam mengendalikan potensi bahaya tersebut. Penelitian Afifah et al., (2025). menemukan bahwa pengetahuan dan pengawasan K3 berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap unsafe action, dengan pengawasan K3 yang baik terbukti menurunkan peluang terjadinya perilaku tidak aman, sehingga menguatkan pentingnya kombinasi pengetahuan dan kontrol lapangan yang konsisten. Studi lain yang menyoroti pengawasan dan sosialisasi K3 juga melaporkan bahwa pengawasan K3 yang kurang baik meningkatkan peluang kejadian unsafe action beberapa kali lipat dibanding pengawasan yang baik, dan kekurangan utama sering muncul pada dimensi pelanggaran supervisi, kegagalan memperbaiki masalah yang sudah diketahui, serta lemahnya pengendalian terhadap kontraktor.

KESIMPULAN

Penggunaan APD dalam upaya penerapan keselamatan kerja pada tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan terlaksana dengan kurang baik. Prosedur kerja yang aman dalam upaya penerapan keselamatan kerja terlaksana dengan sangat baik. Penyediaan alat dan infrastruktur, dan dukungan psikososial dalam upaya penerapan keselamatan kerja pada tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan terlaksana dengan baik. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam upaya penerapan keselamatan kerja juga terlaksana dengan baik. Pengetahuan K3 dalam upaya penerapan keselamatan kerja pada tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan terlaksana dengan sangat kurang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada keluarga besar, dosen pembimbing, seluruh civitas akademik Program Studi Hiperkes Dan Keselamatan Kerja STIK Makassar dan seluruh pihak yang terlibat, yang telah memberikan dukungan dan berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan artikel ini dan semoga informasi dalam artikel ini bermanfaat bagi semua yang membaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Affiah, N., Santiasih, I., & Rachman, F. (2025). Kajian Pengawasan dan Pengetahuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kejadian Unsafe Action pada Pekerja Engineering Supporting pada Jasa Perbaikan Pembangkit Listrik. *Journal of Safety, Health, and Environmental Engineering*, 3(1), 81–88.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 2025. Retrieved March 21, 2025, from Lampungengahkab.go.idwebsite
- Beong, S., Resmawan, E., & Kalinggi, R. (2018). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Samarinda. *Ilmu Pemerintahan*, Samarinda.
- Irsya, F. A. W., & Pamungkas, A. (2021). Konsep penyediaan infrastruktur penampungan darurat di wilayah potensi terdampak gempa. *Jurnal Teknik ITS*, 9(2), C239–C244.
- Lisnawati, I. (2022). Layanan dukungan psikososial pada petugas kesehatan Covid-19. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(2), 205–210.
- Mareta, D., Amanda, A., Hakim, A., & Hanoselina, Y. (2025). Analisis bentuk komunikasi digital di bidang kedaruratan dan logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

- Padang. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 8147–8157.
- Nisa, K. (2025). Strategi mitigasi bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam upaya menanggulangi banjir di Kabupaten Pati. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(2), 1437–1452.
- Pranoto, H. (2024). Manajemen risiko terkait keselamatan dan kesehatan dalam proyek konstruksi. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 2106–2115.
- Ramadoan, S., Firman, F., & Sahrul, S. (2023). Strategi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan perubahan organisasi: Studi di Kantor BPBD Kabupaten Bima. *Mimbar Administrasi FISIP Untag Semarang*, 20(2), 50–59.
- Saba, Z. I. Z. (2024). Pentingnya kesehatan mental karyawan di tempat kerja terhadap kinerja karyawan. *JBK Jurnal Bimbingan Konseling*, 2(02), 38–45.
- Sartina, I., & Purnamawati, D. (2024, Agustus). Evaluasi penggunaan APD dalam konteks kesehatan dan keselamatan kerja di industri konstruksi. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta* (hlm. 131–144).
- Suprayitno, S. (2022). Komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mitigasi dampak perubahan iklim melalui program FoLU (Forestry and Other Land Uses). *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(2), 334–342.
- Suryadi, N. (2020). Peran pemerintah dalam menanggulangi banjir di Kota Samarinda. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 425–436.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Uyun, R. I. C., & Widowati, E. (2022). Hubungan antara pengetahuan pekerja tentang K3 dan pengawasan K3 dengan perilaku tidak aman (unsafe action). *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(3), 391–397.
- Wahyudi, D. (2023). *Upaya pencegahan kecelakaan kerja pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan bencana alam di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah* (Disertasi doktor, IPDN).